



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR : 188.42 / 56 / 2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas penyusunan dan pembahasan serta meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Blora Nomor 188.42/2114 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Program Pembentukan Perda Tahun 2017;
 2. Hasil Musyawarah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 24 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah instrumen program dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dalam Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan DPRD ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 24 Desember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BLORA

KETUA,



BAMBANG SUSILO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada YTH :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Bupati Blora.
-

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 TAHUN ANGGARAN 2017**

A. Ranperda Umum

NO	JUDUL RANPERDA	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KET
1	Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah	Regulasi tentang pembentukan produk hukum daerah	DPRD	
2	Penyidik PNS	Regulasi tentang penyidik PNS	DPRD	
3	Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Regulasi tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD	DPRD	
4	Pertanian	Regulasi tentang pertanian	DPRD	
5	Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	Regulasi tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin	DPRD	
6	Penataan Pedagang Kaki Lima	Regulasi tentang penataan pedagang kaki lima	DPRD	
7	Pendidikan	Regulasi tentang pendidikan	DPRD	
8	Penataan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Perlindungan Pasar Rakyat	Regulasi tentang penataan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta perlindungan pasar rakyat	DPRD	
9	Kabupaten Layak Difabel	Regulasi tentang Kabupaten layak difabel	DPRD	
10	Pendidikan Keagamaan	Regulasi tentang pendidikan keagamaan	DPRD	
11	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian PT. BLORA PATRAGAS HULLU Kabupaten Blora	Regulasi tentang pembentukan dan pendirian PT. BLORA PATRAGAS HULLU Kabupaten Blora	DPRD	
12	Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Blora Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blora dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021	Regulasi tentang Penyertaan Modal	PEMKAB	
13	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	Regulasi tentang tarif pajak daerah	PEMKAB	
14	Izin Gangguan (HO)	Regulasi penerbitan izin gangguan	PEMKAB	
15	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Regulasi tentang pedoman dan tata cara penanaman modal	PEMKAB	
16	Tanda Daftar Perusahaan	Pendaftaran Perusahaan	PEMKAB	
17	Penyelenggaraan Kepariwisata	Regulasi tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata	PEMKAB	

NO	JUDUL RANPERDA	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KET
18	Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	Regulasi tentang insentif daerah	PEMKAB	
19	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame	Regulasi tentang penyelenggaraan reklame	PEMKAB	
20	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Regulasi tentang minuman beralkohol	PEMKAB	
21	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan perencanaan daerah	PEMKAB	
22	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 - 2031	Regulasi tentang Rencana Tata Ruang Daerah	PEMKAB	
23	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Regulasi tentang retribusi tempat khusus parkir	PEMKAB	
24	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora	Regulasi tentang menara telekomunikasi	PEMKAB	
25	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	Regulasi tentang Bangunan Gedung	PEMKAB	
26	Irigasi	Regulasi tentang Irigasi	PEMKAB	
27	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Regulasi tentang pelayanan kesehatan	PEMKAB	
28	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Regulasi tentang pemakaian kekayaan daerah	PEMKAB	
29	Uji Tera	Regulasi tentang tera, tera ulang, alat ukur takar timbangan dan perengkapannya	PEMKAB	
30	Pembudayaan Usaha Mikro dan Kecil	Pendataan, pendafataran, pengembangan, akses pembiayaan, pembinaan dan pengawasan	PEMKAB	
31	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora	Visi, Misi, pembangunan daerah serta tujuan sasaran pembangunan Industri daerah, strategi program pembangunan Industri	PEMKAB	
32	Penetapan Kelurahan di Kabupaten Blora	Pembentukan Kelurahan di Kabupaten Blora	PEMKAB	
33	Kerjasama Antar Desa / Kelurahan	Regulasi kerjasama antar desa/kelurahan	PEMKAB	
34	Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Regulasi tentang pedoman tata cara pembentukan LKMD	PEMKAB	
35	Penetapan Kawasan Perdesaan	Regulasi tentang penetapan kawasan perdesaan	PEMKAB	

NO	JUDUL RANPERDA	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KET
36	Pedoman Pembangunan Desa	Regulasi tentang pedoman pembangunan di desa	PEMKAB	
37	Pencabutan Atas : a. Perda Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa b. Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa c. Perda Kab. Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa d. Perda Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa	Regulasi tentang pencabutan Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	PEMKAB	
38	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Regulasi tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa	PEMKAB	
39	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa	Regulasi tentang Perangkat Desa	PEMKAB	
40	Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa	Regulasi tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa	PEMKAB	
41	Penataan Kearsipan Daerah	Regulasi tentang Kearsipan Daerah	PEMKAB	

B. Ranperda Komulasi Terbuka

NO	JUDUL RANPERDA	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KET
1	Akibat Putusan Mahkamah Agung	Komulasi terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	PEMKAB	
2	Penataan Kecamatan / Penataan Desa	Komulasi terbuka penataan kecamatan / desa	PEMKAB	
3	APBD	Komulasi terbuka APBD, APBD Perubahan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	PEMKAB	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Ketua,

BAMBANG SUSILO

